

PENGARUH PAJAK, INFLASI, DAN INVESTASI TERHADAP PENDAPATAN NASIONAL TAHUN 2014 – 2024

Vivi Adeyani Tandean^{1*}¹ vivi.tandean@wym.ac.id, STIE Wiyatamandala, Indonesia

INFO ARTIKEL**Riwayat Artikel:**

Pengajuan : 26/01/2026

Revisi : 02/02/2026

Penerimaan : 23/02/2026

Kata Kunci:*Pajak, Inflasi, Investasi,
Pendapatan Nasional***Keywords:***Tax, Inflation, Investment,
National Income*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak, inflasi, suku bunga, dan investasi terhadap pendapatan nasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia, kemudian diolah menggunakan *SmartPLS for Windows*. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak, inflasi, dan investasi berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dari tahun 2014 hingga 2024, pemerintah telah berupaya meningkatkan pendapatan nasional melalui penerimaan pajak, pengendalian inflasi, dan peningkatan nilai investasi. Hasil penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa kebijakan ekonomi yang tepat dapat meningkatkan pendapatan nasional secara optimal.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax, inflation, interest rates, and investment on national income. This type of research is quantitative research. obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and Bank Indonesia, then processed using Smart PLS for windows. This research using data multiple regression analysis. The results of this research show tax, inflation and investment has an effect on national income. This study shows that from 2014 to 2024, the government has sought to increase national income through tax revenue, control inflation, and increase investment value. The results of this study also provide empirical evidence that the right economic policies can increase national income appropriately.

Pendahuluan

Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator yang mempunyai peran penting dalam ekonomi makro. Secara teori, ketika pembangunan ekonomi sebuah negara semakin maju, maka pendapatan nasional, baik secara keseluruhan maupun per kapita, juga akan meningkat. Pada umumnya, pendapatan nasional per kapita digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Namun, indikator ini sebenarnya bukan satu-satunya, karena rasa sejahtera masyarakat juga dipengaruhi oleh seberapa merata pendapatan tersebut dibagikan. Pada dasarnya, pendapatan nasional sangat berpengaruh untuk semua lapisan masyarakat. Contohnya, petani sangat terdampak jika pendapatan nasional turun, karena biasanya harga hasil panen mereka juga ikut jatuh. Begitu juga pekerja, jika pendapatan nasional dan produksi menurun, peluang kerja akan berkurang dan pengangguran meningkat.

Penurunan pendapatan nasional bisa memicu berbagai masalah ekonomi. Karena itu, upaya meningkatkan aktivitas ekonomi demi menaikkan pendapatan nasional jadi tujuan utama pembangunan untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan sosial. Bagi pelaku bisnis seperti investor, eksportir, produsen, hingga bankir, pendapatan nasional sangat memengaruhi strategi dan keputusan mereka, terutama jika dilihat dari sisi riil setelah memperhitungkan inflasi. Pendapatan nasional yang besar, jumlah penduduk dan struktur demografis juga memberi gambaran tentang seberapa besar potensi pasar sebuah negara. Semakin tinggi pendapatan per kapita, makin tinggi pula minat investor menanamkan modal, dan pihak bank pun lebih percaya diri untuk menyalurkan kredit.

Bagi negara-negara yang menerima bantuan atau pinjaman, pendapatan nasional juga jadi tolok ukur penting bagi para pemberi pinjaman maupun bantuan dan lembaga keuangan internasional dalam menilai apakah bantuan yang diberikan memberi dampak nyata bagi pembangunan ekonomi di negara

*Penulis Korespondensi: Vivi Adeyani Tandean / vivi.tandean@wym.ac.id

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan nasional sangat krusial karena berhubungan langsung dengan taraf hidup, masa depan bangsa, dan kesejahteraan masyarakat, yang biasanya diukur dari rata-rata pendapatan per kapita. Namun demikian, pendapatan nasional dipengaruhi oleh penerimaan dari seluruh aktivitas ekonomi antara lain penerimaan pajak, inflasi, suku bunga, dan investasi.

Di tengah ketidakpastian global dan moderasi harga komoditas, pada tahun 2023, penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp1.869,23 triliun, dengan rasio pajak terhadap PDB sebesar 10,31%. Sampai akhir Desember 2024, kinerja pendapatan negara tahun 2024 mampu mencapai Rp2.842,5 triliun atau 101,4% dari target APBN 2024 atau mengalami pertumbuhan positif 2,1% yoy. Penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun atau 100,5% dari target dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,5% yoy. Pertumbuhan penerimaan pajak ini didorong oleh peningkatan dari jenis penerimaan pajak utama.

Secara terperinci, penerimaan pajak yang sifatnya transaksional berupa PPh 21, PPh final, dan PPh dalam negeri mengalami pertumbuhan double digit, karena ada beberapa aktivitas di dalam pembayaran gaji, THR, dan aktivitas ekonomi retail yang juga semakin membaik. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai komponen signifikan memiliki rasio stabil terhadap pendapatan nasional antara 7%–9% selama 2010–2022, menunjukkan daya tahan kontribusi PPN pada penerimaan negara, meski sempat menurun saat pandemi COVID-19 pada 2020.

Pemerintah memperluas basis pajak, termasuk digitalisasi, tercatat hingga Januari 2025, penerimaan pajak digital sebesar Rp33,39 triliun. Peningkatan penerimaan pajak memungkinkan pembiayaan lebih besar untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang secara langsung mendorong pertumbuhan ekonomi makro dan peningkatan pendapatan nasional. Namun, pajak yang terlalu tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat atau investasi privat, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terhambat. Oleh karena itu, keseimbangan dalam kebijakan fiskal sangat penting agar pajak tetap memberikan manfaat optimal pada pertumbuhan pendapatan nasional.

Selama 2014–2024, inflasi menunjukkan penurunan yang stabil dan berhasil dikendalikan setelah lonjakan tahun 2014 dan 2022. Inflasi pada tahun 2014 sebesar 8,36%. Inflasi yang tinggi ini disebabkan salah satunya karena adanya kenaikan harga BBM yang mendorong harga barang, jasa transportasi, dan konsumsi lainnya meningkat signifikan. Selanjutnya, selama tahun 2015 sampai dengan 2019, inflasi mengalami penurunan dan relatif stabil, rata-rata sekitar 3% setiap tahun. Adapun besarnya inflasi pada tahun 2015 sebesar 3,35%, tahun 2016 sebesar 3,02%, tahun 2017 sebesar 3,61%, tahun 2018 sebesar 3,13%, dan tahun 2019 sebesar 2,72%.

Hal ini memberikan dampak yang positif secara makro ekonomi serta mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional dan daya beli masyarakat. Pada tahun 2020 sampai dengan 2021, Indonesia mengalami kondisi inflasi sangat rendah akibat pandemi COVID-19 yang menurunkan permintaan agregat. Pada tahun 2020, inflasi sebesar 1,68% dan tahun 2021 inflasi sebesar 1,87%. Rendahnya inflasi pada masa ini mencerminkan tekanan pada sisi permintaan, sehingga pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional sempat terbatas.

Inflasi mengalami kenaikan pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Besaran inflasi pada tahun 2022 yaitu 5,51% karena tekanan global, lalu menurun pada tahun 2023 sebesar 2,61% dan terus melandai hingga 1,57% pada akhir tahun 2024. Kondisi ini disebabkan oleh penguatan koordinasi kebijakan pemerintah dan bank sentral dalam stabilisasi harga pangan dan energi. Inflasi yang moderat menjadi pendukung utama pertumbuhan pendapatan nasional di Indonesia, sementara inflasi ekstrem (tinggi/rendah) punya efek negatif pada konsumsi, investasi, dan output nasional. Keseimbangan antara

pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi mutlak dibutuhkan dalam kebijakan ekonomi makro Indonesia.

Terkait dengan investasi, pada periode 2010–2019 mencatat kenaikan investasi yang sangat signifikan. Pada tahun 2010, tingkat investasi mencapai 60.626 triliun rupiah, dan terus melonjak hingga 386.498 triliun rupiah pada 2019. Ini menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang kuat dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan pemerintah meluncurkan berbagai proyek besar (seperti tol Trans-Jawa, pelabuhan internasional, dan bandara) yang menciptakan kebutuhan investasi besar, serta paket kebijakan deregulasi yang mempermudah investasi, termasuk penerapan sistem perizinan terintegrasi berbasis daring (OSS).

Pada 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan besar pada rantai pasok global dan domestik. Tingkat investasi sempat melambat akibat ketidakpastian ekonomi dan kebijakan pembatasan sosial. Investasi meningkat secara signifikan dari 413.535 miliar rupiah (2020) menjadi 674.923 miliar rupiah (2023). Hal ini mencerminkan pemulihan cepat ekonomi Indonesia (Fitrahwaty, *et al.*, 2025). Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan menelaah bagaimana pengaruh pajak, inflasi, dan investasi terhadap penerimaan nasional dalam rentang tahun 2014 sampai dengan 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi dalam upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan nasional.

Telaah Literatur

Pajak

Pendapatan pemerintah sebagian besar bersumber dari pajak. Ketika penerimaan pajak dialokasikan sebagai modal dalam kegiatan produktif, hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia, sebagai salah satu negara yang berkembang di Asia, telah berupaya untuk secara optimal dalam perkembangan ekonominya. Saat ini, penerimaan pajak di Indonesia telah berkontribusi secara signifikan terhadap berbagai proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah (Prihatiningsih & Susanti, 2023).

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Kebijakan perpajakan yang efektif akan mampu meningkatkan pendapatan dan mendukung pelaksanaan program pembangunan karena penerimaan pajak yang optimal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan pendapatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pajak tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi.

Inflasi

Inflasi merupakan indikator perekonomian yang penting, laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar tidak menimbulkan penyakit makroekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian. Inflasi memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian. Apabila perekonomian suatu negara mengalami suatu kelesuan, maka Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan moneter yang ekspansif dengan cara menurunkan tingkat suku bunga. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus, serta berakibat pada makin tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia (Salim dan Purnamasari, 2021).

Investasi

Stok modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2002). Adanya investasi-investasi akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga

akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran (Prasojo, 2009). Dengan demikian terjadi penambahan output dan pendapatan baru pada faktor produksi tersebut akan menambah output nasional sehingga akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Investasi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan nasional. Investasi, baik dari dalam negeri (investasi domestik) maupun luar negeri (investasi asing), dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat infrastruktur. Investasi juga mendukung modernisasi teknologi dan manajemen yang berdampak pada peningkatan efisiensi produksi. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memperbaiki regulasi, mempermudah perizinan, dan menjamin kepastian hukum bagi investor (Fahri dan Hendra, 2025).

Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, pendapatan nasional memiliki peranan vital dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan pembangunan. Pendapatan nasional tidak hanya mencerminkan hasil produksi barang dan jasa dalam suatu periode tertentu, tetapi juga mencerminkan sejauh mana kegiatan ekonomi mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

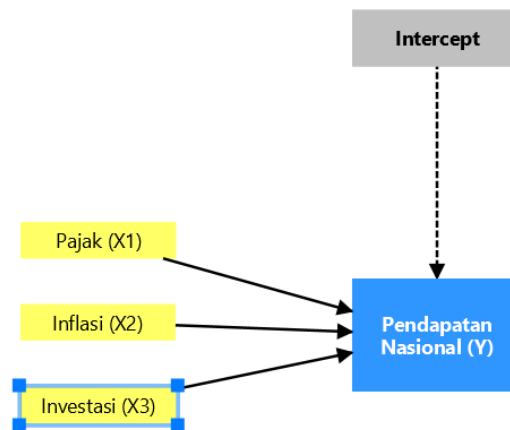
Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan nasional agar dapat dirumuskan strategi ekonomi yang tepat guna mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan (Sri Gustiani & Hendra Riofita, 2024). Pendapatan nasional suatu negara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, termasuk pajak dan inflasi. Di Indonesia, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak untuk mendukung kebutuhan anggaran negara. Pada tahun 2023, pemerintah mencatat rasio perpajakan sebesar 10,31% dari Produk Domestik Bruto (PDB), menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Doli Syahputra *et al.*, 2025).

Penelitian Terkait

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai pajak, inflasi, dan investasi terhadap pendapatan nasional dengan variabel yang terpisah-pisah dan hasil yang bervariasi. Selain itu, penggunaan metode analisis yang berbeda-beda juga terdapat dalam beberapa penelitian sebelumnya. Salah satu sumber referensi utama dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Doli Syahputra *et al.* (2025) menyatakan bahwa pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan nasional sedangkan inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan nasional. Penelitian ini menggunakan data dari periode 2018–2024.

Penelitian terkait lainnya disampaikan oleh Fitrahwaty *et al.* (2025) dengan menggunakan variabel investasi dan suku bunga sebagai variabel independen dan PDB sebagai variabel dependen dengan periode data yang digunakan adalah periode 2003–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel investasi terhadap PDB dan tidak terdapat pengaruh atau berpengaruh negatif variabel suku bunga terhadap PDB. Penelitian lainnya adalah yang dilakukan Amir Salim dan Anggun (2023) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan periode data 2016–2020 dengan hasil yang berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, dimana inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau PDB. Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini

adalah sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1 berikut ini. Gambar tersebut mengilustrasikan pengaruh variabel bebas sebanyak tiga variabel terhadap Pendapatan Nasional sebagai variabel terikat.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran pengaruh Pajak, Inflasi, dan Investasi terhadap Pendapatan Nasional

Sumber: Penulis (2025)

Metode

Jenis Penelitian dan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang telah dipublikasikan secara resmi oleh pihak lain secara runtut waktu. Data sekunder yang digunakan berupa data inflasi yang disajikan oleh Bank Indonesia (BI) dan data total penerimaan pajak, Produk Domestik Bruto (PDB), serta data investasi yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan berdasarkan deret waktu (*time series*) yang diambil dari periode sebelas tahun terakhir yaitu 2014–2024. Pendekatan penelitian kuantitatif bersifat konfirmasi karena berfokus pada pengujian hipotesis dan teori. Dalam aktivitas penelitian, seorang peneliti menyatakan hipotesis terlebih dahulu, kemudian mengujinya dengan data empiris untuk melihat apakah hipotesis tersebut didukung (Johnson & Christensen, 2014). Metode penelitian ini menjadi primadona dalam penelitian sejak abad ke-19 hingga sepanjang abad ke-20. Metode ini didasarkan pada pandangan *postpositivist* (John W. Creswell & Creswell, 2018).

Variabel dependen (Y) yang merupakan variabel terikat dalam penelitian ini adalah pendapatan nasional dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai acuan operasional variabel. Sedangkan variabel independen (X) atau variabel bebas yang tidak bergantung dan memengaruhi variabel lain yaitu Pajak (X1) dengan total penerimaan pajak sebagai acuan operasional variabel, Inflasi (X2) dengan data inflasi sebagai acuan operasional variabel, dan Investasi (X3) dengan total investasi sebagai acuan operasional variabel seperti yang disampaikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi Operasional Variabel Penelitian	Sumber Data
1.	Pendapatan Nasional	Produk Domestik Bruto (PDB)	BPS
2.	Pajak	Total Penerimaan Pajak	BPS
3.	Inflasi	Data Inflasi	BI
4.	Investasi	Total Investasi	BPS

Sumber: Data Diolah (2025)

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan *SmartPLS 4*. Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik yang di dalamnya meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, dan uji t.

Dari variabel bebas dan variabel terikat tersebut serta metode regresi data panel yang disebutkan di atas, maka model persamaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

Y	: Pendapatan Nasional
α	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_6$	: Koefisien Regresi
X ₁	: Pajak
X ₂	: Inflasi
X ₃	: Investasi
ε_{it}	: Error Term

Hasil Dan Pembahasan

Pada bagian ini akan dijelaskan data deskriptif statistik sebagaimana Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Deskriptif Statistik

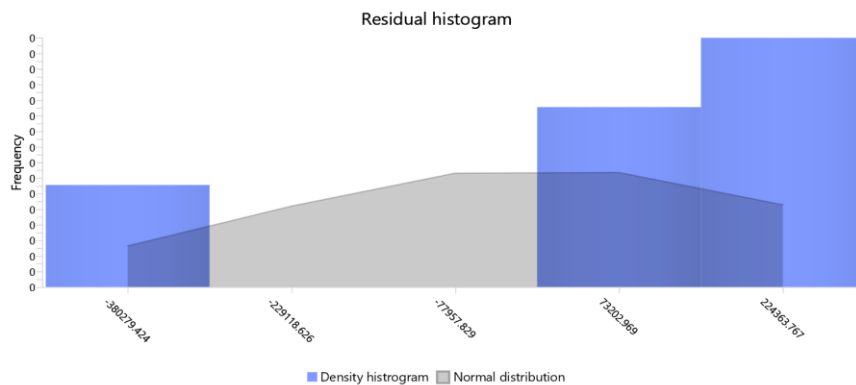
	Mean	Median	Observed min	Observed max	Standard deviation
Pajak (X1)	1.579.680.455	1.518.790.000	1.146.866.000	2.309.860.000	377.529.838
Inflasi (X2)	0.034	0.030	0.016	0.084	0.019
Investasi (X3)	370.033.000	386.498.000	156.126.000	674.923.000	153.841.003
Pendapatan Nasional (Y)	10.640.451.909	10.722.999.000	8.564.867.000	12.920.282.000	1.297.527.761
Intercept	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Sumber: Penulis (2025)

Dari Tabel 2 tersebut, nilai pendapatan nasional tertinggi adalah 12.920.282.000 pada tahun 2024 dan nilai terendah adalah 8.564.867.000 pada tahun 2014. Pada variabel pajak, nilai tertinggi adalah 2.309.860.000 pada tahun 2024 dan nilai terendah 1.146.866.000 adalah pada tahun 2014. Untuk nilai tertinggi pada variabel inflasi adalah 0,084 pada tahun 2014 dan nilai terendah 0,016 pada tahun 2024. Pada variabel investasi nilai tertinggi adalah 674.923.000 pada tahun 2023 dan nilai terendah 156.126.000 pada tahun 2014.

Dari data deskriptif statistik tersebut, maka tahapan selanjutnya dalam teknis analisis adalah uji asumsi klasik dimana dalam analisis tersebut ada tiga pengujian yaitu: Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas.

Uji Normalitas



Gambar 2. Uji Normalitas

Sumber: Penulis (2025)

Berdasarkan Gambar 2, uji normalitas yang diwakili dengan gambar residual histogram di atas menunjukkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi dengan normal. Diagram yang berwarna abu menunjukkan bahwa data yang tersebar berada di angka -2 dan +2. Hasil ini juga diperkuat dengan data kurtosis yang menunjukkan angka -0,711 dan *skewness* di angka -0,741. Kurtosis menunjukkan apakah distribusi terlalu runcing atau datar dibandingkan dengan distribusi normal. Kurtosis positif berarti distribusi lebih runcing, sedangkan kurtosis negatif berarti distribusi lebih datar. Kurtosis lebih dari +2 menunjukkan distribusi yang terlalu runcing, sedangkan kurang dari -2 menunjukkan distribusi yang terlalu datar.

Ketika *skewness* dan kurtosis mendekati nol, distribusi dianggap normal. *Skewness* mengukur simetri distribusi suatu variabel. Jika distribusi condong ke ekor kanan atau kiri, maka distribusi tersebut bersifat *skewed*. *Skewness* negatif menunjukkan lebih banyak nilai yang lebih besar, sedangkan *skewness* positif menunjukkan lebih banyak nilai yang lebih kecil. Nilai *skewness* antara -1 dan +1 dianggap sangat baik, sedangkan antara -2 dan +2 umumnya dapat diterima. Nilai di luar rentang -2 dan +2 menunjukkan ketidaknormalan yang signifikan (Hair *et al.*, 2022).

Uji Multikolinearitas

Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) adalah nilai yang digunakan untuk menguji kolinearitas model. Nilai VIF yang lebih tinggi dari 10,00 menunjukkan bahwa ada masalah dengan kolinearitas, karena nilai VIF yang tinggi dapat menyebabkan kesulitan dalam menginterpretasikan koefisien jalur. Sebaliknya, nilai VIF yang kurang dari 10,00 menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan kolinearitas (Hair *et al.*, 2022). Tujuan uji kolinearitas adalah untuk mengetahui apakah dua atau lebih variabel dalam model regresi saling berhubungan. Akan sulit untuk membedakan efek individu dari masing-masing variabel terhadap variabel endogen atau dependen jika terdapat kolinearitas.

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

	VIF
Pajak (X1)	3.024
Inflasi (X2)	1.172
Investasi (X3)	3.239

Sumber: Penulis (2025)

Berdasarkan Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa nilai VIF dari pajak sebesar 3,024, nilai VIF dari inflasi sebesar 1,172 dan nilai VIF dari investasi sebesar 3,239. Berdasarkan ketiga nilai VIF tersebut < 10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas terhadap variabel independen yang diuji.

Uji Heteroskedastisitas

Definisi heteroskedastisitas menurut [Hair et al. \(2022\)](#) adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidaksamaan varian dari residual (*error*) dalam model regresi antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Dalam model regresi yang baik, seharusnya varian residual tetap untuk seluruh observasi, sehingga disebut homoskedastisitas; sedangkan jika varian tersebut berbeda-beda, maka terjadi heteroskedastisitas. Salah satu metode statistik yang sering digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah Uji *Breusch-Pagan*. Dalam pendekatan ini, residual hasil regresi dikuadratkan dan diregresikan kembali terhadap variabel independen. Hipotesis nol (H_0) dalam uji ini menyatakan bahwa varian residual adalah konstan (homoskedastisitas), sedangkan hipotesis alternatif (H_1) menyatakan adanya ketidakkonstanan varian residual (heteroskedastisitas).

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

	Test-Statistic	df	P value
Breusch-Pagan Test	0.389	3	0.943

Sumber: Penulis (2025)

Berdasarkan Tabel 4 uji heteroskedastisitas, angka P value menunjukkan 0,943 dimana nilai P value lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi non-heteroskedastisitas terpenuhi atau dengan kata lain homoskedastisitas.

Tabel 5. Uji t

	Unstandardized coefficients	Standardized coefficients	SE	T value	P value	2.5 %	97.5 %
Pajak (X1)	2.064	0.601	0.433	4.768	0.001	1.066	3.062
Inflasi (X2)	-15.907.040.566	-0.231	5.399.418.833	2.946	0.019	-28.358.145.273	3.455.935.858
Investasi (X3)	2.678	0.318	1.099	2.436	0.041	0.143	5.213
Intercept	6.930.315.665	0.000	509.982.433	13.589	0.000	5.754.291.935	8.106.339.394

Sumber: Penulis (2025)

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 5 menunjukkan pengaruh secara parsial variabel pajak, inflasi, dan investasi terhadap pendapatan nasional yang dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai signifikansi variabel Pajak sebesar $0,001 < 0,05$ yang berarti bahwa pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan nasional. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan [Doli Syahputra, et al. \(2025\)](#) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan nasional.

Pengaruh pajak terhadap pendapatan nasional merupakan salah satu aspek penting dalam ekonomi yang sering dianalisis untuk memahami dinamika keuangan suatu negara. Pajak berfungsi sebagai sumber utama pendapatan bagi pemerintah, yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketika pajak meningkat, pemerintah memiliki lebih banyak dana untuk diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan nasional. Namun, di sisi lain, pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menghambat konsumsi, yang juga berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, hubungan antara pajak dan pendapatan nasional bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan fiskal, tingkat inflasi, dan kondisi ekonomi global. Dengan memahami pengaruh pajak, pemerintah

dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Doli Syahputra, *et al.*, 2025).

- b. Nilai signifikansi variabel inflasi sebesar $0,019 < 0,05$ yang berarti bahwa inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan nasional. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amir Salim dan Anggun (2023) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil berbeda diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Doli Syahputra, *et al.* (2025) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan nasional.

Inflasi merupakan indikator perekonomian yang penting, lalu pertumbuhannya sebaiknya dijaga rendah dan stabil agar tidak menimbulkan gangguan makroekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian (Salim dan Purnamasari, 2021). Berdasarkan hasil di atas, inflasi bisa menjadi tolok ukur bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional karena inflasi digunakan untuk mengukur seberapa kuat daya beli masyarakat sehingga pemerintah bisa menyusun kebijakan yang dapat meningkatkan konsumsi masyarakat.

- c. Nilai signifikansi variabel investasi sebesar $0,041 < 0,05$ yang berarti bahwa investasi berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan nasional. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fitrahwaty, *et al.* (2025) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel investasi terhadap PDB.

Nilai investasi yang tinggi dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi baik dengan penyerapan tenaga kerja dari munculnya kegiatan ekonomi dari hadirnya investasi sehingga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, dan dapat juga berdampak positif terhadap pendapatan nasional.

Tabel 6. Hasil Uji Simultan (Uji F)

	Sum square	df	Mean square	F	P value
Total	18.519.361.191.898.900	10	0.000	0.000	0.000
Error	680.178.594.844.247	7	97.168.370.692.035	0.000	0.000
Regression	17.839.182.597.054.600	3	5.946.394.199.018.220	61.197	0.000

Sumber: Penulis (2025)

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) pada Tabel 6 menunjukkan nilai *P value Regression* sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Artinya, hipotesis penelitian ini diterima karena semua variabel Pajak, Inflasi, dan Investasi yang dijadikan variabel dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Nasional secara simultan.

Tabel 7. Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Pendapatan Nasional (Y)	
R-square	0.963
R-square adjusted	0.948
Durbin-Watson test	1.839

Sumber: Penulis (2025)

Berdasarkan hasil uji *adjusted R square* pada Tabel 7 memiliki nilai koefisien determinasi (*adjusted R square*) sebesar 0,948. Hal tersebut menunjukkan sebesar 94,8% Pendapatan Nasional tahun 2014–2024 dapat diterangkan oleh 3 variabel bebas/independen, yakni pajak, inflasi, dan investasi yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya sebesar 5,2% diterangkan oleh aspek lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah melihat dan meneliti dampak dari pajak, inflasi, dan investasi terhadap pendapatan nasional dari tahun 2014 sampai dengan 2024. Pajak, inflasi, dan investasi merupakan variabel independen yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan serta memberikan dampak positif setiap menyusun kebijakan dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional. Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel pajak, inflasi, dan investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan nasional. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan nasional.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, terutama dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional, baik melalui peningkatan penerimaan pajak dan menetapkan kebijakan pajak yang komprehensif, mengontrol laju pertumbuhan inflasi sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga, maupun meningkatkan investasi baik dalam maupun luar negeri sehingga daya saing sumber daya manusia meningkat serta menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan.

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan mempertimbangkan penggunaan variabel independen yang lebih relevan dengan variabel dependen. Misalnya, suku bunga dan stabilitas politik serta dapat memperluas periode penelitian sehingga akan memberikan hasil penelitian yang lebih komprehensif dan relevan.

Referensi

- Creswell, John W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Fifth Edition). London EC1Y 1SP: SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Doli Syahputra Hasibuan, Lilis Sartika Sihite, Nazwa Aulia, & Divo Valentino Siboro. (2025). Analisis Pengaruh Pajak dan Inflasi Terhadap Pendapatan Nasional: Bukti Empiris Tahun 2018–2024. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, Volume 4, Nomor 2, April 2025. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i2.3959>
- Fahri Azizi dan Hendra Riofita. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Nasional di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 9, Nomor 1, Tahun 2025. ISSN: 2614-3097.
- Fitrawaty, Indriana Dachi, Margareitha Sembiring & Nurul Azmi. (2025). Pengaruh Investasi dan Suku Bunga terhadap PDB dalam Menurunkan Kurva IS di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4, No. 2, Februari 2025. ISSN: 2828-5271.
- Hair, et al. (2021). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R*. United States of America: SAGE Publications, Inc.
- Johnson, R. B., & Christensen, L. (2014). *Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches*. In R. Hester, T. Accomazzo, L. Barrett, & P. L. Fleming (Eds.), SAGE Publications, Inc. California. Singapore: SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4324/9781351004626-12>
- Prasojo, Priyo. (2009). Analisa Pengaruh Investasi PMA dan PMDM, Kesempatan Kerja, Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB di Jawa Tengah Periode Tahun 1980–2006.
- Prihatiningsih, B. E., & Susanti, A. (2023). Mufakat Mufakat. *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen*, 2(2), 91–107.
- Salim, A. P., & Anggun Purnamasari, R. F. (2021). Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 17–27.
- Sukirno, Sadono. (2002). *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. www.bi.go.id
www.bps.go.id